

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan**

##### **1. Pengertian Kebijakan dan Ruang Lingkup**

Secara etimologi kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Latin *politia* yang berarti Negara, *polis* disebut dalam bahasa Yunani yang berarti kota dan kata *pur* dalam bahasa Sanskrit berarti kota serta *police* dalam bahasa Inggris berarti administrasi pemerintah. Berdasarkan asal kata ini menghasilkan tiga jenis pengertian yang sekarang ini dikenal dengan *politic*, *policy*, *polici*. *Politic* berarti seni dan ilmu pemerintah *the art and science of government*, sedangkan *policy* berarti hal-hal mengenai kebijakan pemerintah, sedangkan *police* berarti hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan adapun kebijakan pendidikan terjemahan dari *educational policy*.<sup>1</sup> Secara terminologi kebijakan publik menurut Robert Eyestone ialah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang dengan kewenangannya dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Kebijakan publik adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan para

---

<sup>1</sup>Ace Suryadi & H.A.R Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2005), h. 42-45

menajer dan personel dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Kebijakan publik sebagaimana ditulis oleh Ali Imron merupakan sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi sosial ekonomi. Banyak kalangan mempersoalkan dan membedakan pengertian kebijakan dan kebijaksanaan dalam studi kebijakan publik di Indonesia. Petanyaan yang sering diajukan adalah apakah kebijakan dan kebijaksanaan mempunyai arti yang sama atau berbeda. Ali Imron berpendapat bahwa :

Kata kebijaksanaan merupakan terjemahan dalam bahasa Inggris *policy* yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, dan juga administrasi pemerintah. Sedangkan kebijakan adalah terjemahan dari *wisdom*. Kata *policy* kemudian memunculkan beberapa istilah yaitu *politic*, *policy*, dan *polic*. *Politic* berarti seni dan ilmu pemerintahan (*The art and science of government*); *policy* berarti hal-hal mengenai kebijaksanaan pemerintah, dan *polic* yang berkenaan dengan pemerintahan. Sedangkan *wisdom* (Kebijakan) adalah suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan kepada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku. Dari pembedaan terminologi ini kebijaksanaan (*policy*) dipahami sebagai aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengikat kepada siapa pun dengan kebijaksanaan tersebut. Sedangkan kebijakan (*wisdom*) adalah suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan kepada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Budi Winarno, *Teori Kebijaksanaan Public*, (Yogyakarta, Pusat Antar Universitas, Studi Sosial Universitas Gajah Mada, 1989), hlm.16.

<sup>3</sup>Djumdjum Noorbenty dan Ali Imron, *Analisis Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Bandung, Bintang Ilmu, 1996), h. 80.

Definisi lain terkait dengan kebijakan publik telah diungkapkan oleh para ahli sebagaimana dikutip Ali Imron, di antaranya Carl J. Friedrich mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut :

*Public policy is a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose.* (Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan

terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).<sup>4</sup>

James E. Anderson; *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”* (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah),<sup>5</sup> dan Syafaruddin mengartikan kebijakan publik sebagai hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan pada manager dan personel dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

Menurut Dye sebagaimana dikutip Islamy, kebijakan publik adalah pilihan-pilihan apapun oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu maupun

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 80-81.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 80.

<sup>6</sup>Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan; Konsep, Strategi dan Aplikasi Menuju Sekolah Efektif*, (Jakarta, Rhinneka Cipta, 2001), h. 21.

tidak melakukan sesuatu (...*is whatever government chooses to do or not to do*).<sup>7</sup>

Jenkins sebagaimana dikutip Wahab, merumuskan Kebijakan Publik sebagai “*A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a spesified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve.*”<sup>8</sup>

Menurut Lasswell dan Kaplan sebagaimana dikutip Islamy, mendefenisikan kebijakan publik merupakan “*a projected program of goals, velues and practices*” (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah).<sup>9</sup> Sebagai suatu program dengan tujuan tertentu, kebijakan publik juga merupakan suatu tindakan pemerintah yang memuat prinsip untuk menyikapi suatu krisis, sebagaimana dikemukakan oleh Parker sebagaimana dikutip Sulaeman, bahwa kebijakan publik berkait dengan suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip-prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan beberapa subyek atau sebagai tanggapan terhadap beberapa krisis.<sup>10</sup> Dengan demikian, kebijakan publik merupakan wujud dari komitmen pemerintah yang diterjemahkan ke dalam

---

<sup>7</sup>M. Irfan Islamy, *Aparatur Pemerintah Daerah*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 20.

<sup>8</sup>Solichin Abdul Wahab, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Malang, Penerbit FIA. UNIBRAW dan IKIP 2001), h. 4.

<sup>9</sup>M. Irfan Islamy, *op. cit.*, h. 15.

<sup>10</sup>Affan Sulaeman, *Public Policy; Kebijakan Pemerintah*, (Bandung, Bintang Ilmu, 2002), h. 4.

program dan mempunyai tujuan, prinsip serta tindakan pemerintah dalam menyikapi berbagai masalah publik.

Berbeda dengan konsep yang dipaparkan di atas, Nakamura dan Smallwood sebagaimana dikutip Sulaeman, melihat kebijakan publik dari tiga lingkungan yaitu lingkungan perumusan kebijakan (*policy formulation*), pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*) dan penilaian kebijakan (*policy evaluation*).<sup>11</sup> Udoji sebagaimana dikutip Wahab, dengan tegas mengatakan bahwa : “*the execution of policies is as important if non more important than policy-making. policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented*” (dari keseluruhan aspek proses kebijakan publik, tanpa mengecilkan arti atau fungsi dari aspek yang lain, impelentasi kebijakan merupakan aspek yang penting).<sup>12</sup>

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan, berkait dengan pertanyaan siapa yang menjalankan dan bagaimana mereka memelihara dukungan yang didapat. Selanjutnya dalam fase implementasi kebijakan mengandung karakteristik bahwa kebijakan yang telah diambil akan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Salah satu ukuran tercapainya tujuan suatu kebijakan adalah pada teknis operasionalnya, bagaimana implementasinya di lapangan sebagaimana yang dikemukakan Wahab bahwa : implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 5.

<sup>12</sup>Sholichin Abdul Wahab, *op. cit.*, h. 59.

sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.<sup>13</sup> Berkaitan dengan itu

Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip Wahab, mengatakan bahwa :

Implementasi kebijakan pemerintahan mengandung makna tertentu, yaitu: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.<sup>14</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, jika kebijakan dikaitkan dengan pendidikan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang dirumuskan melalui proses pengambilan keputusan oleh pejabat publik (pemerintah) berdasarkan permasalahan yang timbul di bidang pendidikan yang dimulai dengan perumusan, penetapan, implementasi hingga pada evaluasi terhadap sistem pendidikan guna tercapainya tujuan pendidikan yang harus dilaksanakan. Kebijakan pendidikan pada hakikatnya berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan ditulis untuk dipedomani oleh pimpinan, staf dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal. Wujud dari kebijakan pendidikan ini

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 59.

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 65.

biasanya berupa undang-undang pendidikan, intruksi, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya menyangkut pendidikan.

## 2. Faktor-faktor, Fungsi dan Arah Kebijakan

Dalam proses implementasi kebijakan di lapangan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, faktor-faktor itu menurut Wahab adalah : (a) kondisi sosio ekonomi dan teknologi; (b)dukungan publik; (c) sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok; (d)dukungan dari pejabat atasan; dan (e) komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana.<sup>15</sup> Edwards, mengatakan :

*“What are the primary obstacle to successful policy implementation... to answer these question four critical factor or variables in implementing public policy : communication, resources, disposition or attitudes, and bureaucratic structur.”*<sup>16</sup>

Secara konsepsional bahwa kemampuan pencapaian hasil atau keberhasilan serta kegagalan suatu kebijakan menurut Hogwood dan Gunn sebagaimana dikutip Wahab, dikelompokkan ke dalam dua ketegori, yaitu : *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccesful implementation* (implementasi yang tidak berhasil).<sup>17</sup> Tidak terimplementasi dimaksudkan bahwa

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 93.

<sup>16</sup>Edwards Gc. III, *Implementing Public Policy*, (Palumbo Dj, Harder Mh, Congressional Quarterly Press, 1981), h. 9-10.

<sup>17</sup>Sholichin Abdul Wahab, *op. cit.*, h. 61.

suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat tidak mau bekerja sama, atau permasalahan yang menjadi bidang garapan diluar jangkauan kekuasaannya, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan. hal ini mempunyai akibat usaha implementasi kebijakan yang efektif akan sulit terpenuhi. Sedangkan implementasi yang tidak berhasil dimaksudkan bahwa suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya faktor-faktor alam/ lingkungan), sehingga kebijakan tidak berhasil seperti yang dikehendaki.

Keberhasilan sebuah kebijakan juga ditentukan oleh dukungan dan partisipasi dari masyarakat, sehingga dengan suka rela melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sunggono, selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi anggota masyarakat dalam pelaksanaan suatu kebijakan adalah :

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melaksanakan suatu kebijakan public: (1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah, (2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, (3) Adanya keyakinan suatu kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu serta melalui prosedur yang benar, (4) Adanya kepentingan pribadi, (5)Adanya kekuatan hukuman-hukuman tertentu bila tidak dilaksanakan kewajiban, dan (6)Masalah waktu.



- b. Faktor-faktor masyarakat tidak melaksanakan kebijakan : (1) Kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai masyarakat, (2) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, (3) Keanggotaan seseorang dalam suatu perkumpulan atau kelompok, (4) Keinginan untuk mencari untung yang cepat, dan (5) Adanya ketidakpastian hukum.<sup>18</sup>

Dari berbagai faktor itu, jelas sekali bahwa banyak faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijaksanaan publik. Hal ini berkait pula dengan efektifnya suatu kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Islamy bahwa : suatu kebijaksanaan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat.<sup>19</sup> Dengan demikian, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. dengan demikian kalau mereka tidak bertindak/berbuat sesuai dengan keinginan pemerintah/negara itu, maka kebijaksanaan negara menjadi tidak efektif. Negara bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama ke arah yang lebih baik, dan pengaturan itu dikeluarkan melalui kebijakan pemerintah untuk memenuhi fungsinya dengan misi yang tidak bersifat *non profit oriented*, untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>18</sup>Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta, Sinar Harapan, 1994), h. 144.

<sup>19</sup>M. Irfan Islamy, *op. cit.*, h. 107.

Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan sebagai pedoman oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal. Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan.<sup>20</sup> Pembuatan kebijakan (*policy making*) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses (transformasi), output (keluaran), dan *feedback* (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan. Berkaitan dengan masalah ini, kebijakan dipandang sebagai: (1) pedoman untuk bertindak, (2) pembatas perilaku, dan (3) bantuan bagi pengambil keputusan.<sup>21</sup>

Berdasarkan penegasan di atas dapat dipahami bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang organisasi.

---

<sup>20</sup>Yonathan Pongtuluran, *Kebijakan Organisasi dan Pengambilan Keputusan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1995), h. 7.

<sup>21</sup>*Ibid.*

## **B. Sistem Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional**

### **1. Pengertian Sistem Pendidikan Islam dan Ruang Lingkup**

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani *System* yang berarti hubungan fungsional yang teratur antara unit-unit atau kelompok-kelompok.<sup>22</sup> Defenisi lain menyebutkan bahwa system adalah kumpulan berbagai komponen yang berinteraksi satu dengan lainnya sehingga membentuk kesatuan dengan tujuan yang jelas.<sup>23</sup> Menurut Tohari Musnamar istilah sistem berarti hubungan fungsional yang teratur antara unit-unit atau komponen-komponen. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya.<sup>24</sup> Sistem adalah kumpulan komponen yang berinteraksi satu dengan lainnya membentuk satu kesatuan dengan tujuan jelas. Sistem merupakan cara untuk mencapai tujuan tertentu di mana dalam penggunaannya bergantung pada berbagai faktor yang erat hubungannya dengan usaha pencapaian tujuan tersebut.<sup>25</sup> Dengan demikian, sistem merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan.

---

<sup>22</sup>WJS. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1976), h. 955.

<sup>23</sup>Fuad Asmari, *Keharmonisan Lingkungan Sebagai Determinan Keberhasilan Pembangunan Pendidikan ; Suatu Analisis Dari Sudut Pandang Islam*, (Surabaya, Indah Offset, 1996), h. 52.

<sup>24</sup>Tohari Musnamar, *Bimbingan Sebagai Suatu Sistem*, (Yogyakarta, Cendekia Sarana Informatika, 1985), h. 38. Armai Arief, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Ciputat Pers, 2002), h. 69.

<sup>25</sup>M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam (Islam dan Umum)*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1993), h. 245.

Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka yang dimaksud dengan Sistem Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur pendidikan yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain serta saling mempengaruhi dalam satu kesatuan.<sup>26</sup> Sebab, pendidikan merupakan sebuah kegiatan yang kompleks, meliputi berbagai komponen yang berkaitan satu sama lain. Jika pendidikan ingin dilaksanakan secara terencana dan teratur, maka berbagai elemen yang terlibat dalam kegiatan pendidikan perlu dikenali. Untuk itu diperlukan pengkajian usaha pendidikan sebagai suatu sistem. Selanjutnya secara total bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang memiliki kegiatan cukup kompleks, meliputi berbagai komponen yang berkaitan satu sama lain. Jika menginginkan pendidikan terlaksana secara teratur, berbagai elemen (komponen) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan perlu dikenali terlebih dahulu.

Untuk itu diperlukan pengkajian usaha pendidikan sebagai suatu sistem yang dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro pendidikan dapat dilihat dari hubungan eleven peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Adapun secara makro menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Sistem Pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerjasama secara terpadu, dan saling melengkapi satu

---

<sup>26</sup>Ridwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal; Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), h. 28.

sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah menjadi cita-cita bersama pelakunya.<sup>27</sup>

Istilah “Pendidikan” berasal dari kata “didik” dengan awalan “pe” dan akhiran “kan”, yang mengandung arti “perbuatan”, cara, dan sebagainya. Ia berasal dari bahasa Yunani yaitu “*paedagogie*”, yang berarti bimbingan, yang diberikan kepada anak.<sup>28</sup> Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, “*education*” yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam Islam ada tiga istilah yang dipakai untuk pendidikan yaitu ” ‘*al-Tarbiyah*’ (التربية), ‘*al-Ta’lim*’ (التعليم) dan ‘*al-Ta’dib*’ (التأديب). Dalam Kamus Bahasa Arab, kata *al-Tarbiyah* berasal dari tiga kata yaitu; (1) *rabba-yarbu* (ربو) yang mengandung arti : bertambah, tumbuh, (2) ‘*rabiya- yarbaa*’ (ربى-يربى) berarti menjadi besar, dan (3) ‘*rabba-yarubbu*’ (يرب) yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, memelihara.<sup>29</sup>

Pada masa sekarang istilah populer yang digunakan adalah *al-Tarbiyyah* karena menurut Athiyah al-Abrasyi, *al-Tarbiyah* adalah term yang mencakup keseluruhan kegiatan pendidikan, yang merupakan upaya mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna etika, sistematis dalam berpikir, memiliki ketajaman intuisi, giat dalam berkreasi, memiliki toleransi yang

---

<sup>27</sup>Eti Rochaeti, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, (Jakarta, Bina Aksara, 2007), h. 7. Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta, INIS, 1994), h. 26.

<sup>28</sup>Ibrahim Saat, (Ed.), *Isu Pendidikan di Malaysia*, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982), h. 459.

<sup>29</sup>Karim al-Bastani, dkk, *al-Munjid fi al-Lughat wa al-‘Alam*, (Beirut, Dar al-Masyriqi, 1975), h. 243-244.

lain, berkopetensi dalam mengungkap bahasa lisan dan tulisan, serta memiliki beberapa ketrampilan.<sup>30</sup> Dengan demikian Pendidikan Islam disebut *Tarbiyah al-Islamiyah*.

Menurut Naquib al-Attas, *tarbiyah* secara semantik tidak khusus ditujukan untuk mendidik manusia, tetapi dapat dipakai kepada spesies lain, seperti mineral, tanaman dan hewan. Selain itu *tarbiyah* berkonotasi material; ia mengandung arti mengasuh, mengandung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membuat, menjadikan bertambah pertumbuhan, membesarkan, memproduksi hasil-hasil yang sudah matang dan menjinakkan.<sup>31</sup> Abdurrahman al-Nahlawi mengambil konsep-konsep pendidikan dari akar-akar kata tersebut lebih jauh lagi, menurutnya bahwa di dalam pendidikan itu tiga unsur, yakni menjaga dan memelihara anak, mengembangkan potensi anak sesuai dengan ke khasan masing-masing, mengarahkan potensi dan bakat agar mencapai kebaikan dan kesempurnaan; dan seluruh proses di atas dilakukan secara bertahab sesuai dengan konsep “sedikit demi sedikit” atau “prilaku demi prilaku.”<sup>32</sup>

Ahmad Mushtafa al-Maraghiy membagi kegiatan *al-Tarbiyah* dengan dua macam, yaitu (1) *Tarbiyat al-Khalqiyat*, yaitu penciptaan, pembinaan dan pengembangan jasmani peserta didik agar dapat dijadikan sebagai sarana bagi

---

<sup>30</sup>Muhammad Athiyah al-Abrasyiy, *Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta'lim*, (Saudi Arabia, Dar al-Ihya', tt), h. 7.

<sup>31</sup>Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, Terj. Haidar Baqir, (Bandung, Mizan, 1984), h. 66.

<sup>32</sup>Abdur Rahman al-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat*, Terj. Shihabuddin, (Jakarta, Gema Insani Press, 1995), h. 12.

pengembangan jiwanya, dan (3) *Tarbiyat diniyat tahzibiyat*, yaitu pembinaan jiwa manusia dan kesempurnaannya melalui petunjuk wahyu Ilahi.<sup>34</sup> Sementara Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.<sup>35</sup>

Dengan demikian pendidikan Islam adalah suatu kegiatan yang mengarahkan dengan sengaja perkembangan seseorang sesuai dengan atau sejalan dengan nilai-nilai Islam, dikembangkan melalui berbagai kelembagaan pendidikan formal atau non formal, sesuai dengan sifat dan watak kelenturan nilai-nilai ajaran Islam. Model kelembagaan pendidikan yang tetap berkembang dalam masyarakat Islam di berbagai tempat merupakan wadah yang akomodatif terhadap aspirasi umat Islam yang berorientasi kepada pelaksanaan misi Islam dalam tiga dimensi pengembangan kehidupan manusia yaitu :

- a. Dimensi kehidupan duniawi yang mendorong manusia sebagai hamba Allah untuk mengembangkan dirinya dalam ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan yaitu nilai-nilai Islam.
- b. Dimensi kehidupan ukhrawi mendorong manusia untuk mengembangkan dirinya dalam pola hubungan yang serasi dan seimbang dengan Tuhannya.

---

<sup>34</sup> Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *op. cit.*, h. 7 dan 14. Ahmad Mustafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Beirut, Dar al-Fikr, tt), Juz I, h. 30.

<sup>35</sup> Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *op. cit.*, hlm.100. Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung, Maktabah al-Ma'rif, 1980), h. 131.

Dimensi inilah yang melahirkan berbagai usaha agar kegiatan ubudiyahnya senantiasa berada di dalam nilai-nilai agamanya.

- c. Dimensi hubungan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi mendorong manusia untuk berusaha menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang utuh dan paripurna dalam ilmu pengetahuan dan ketrampilan, sekaligus menjadi pendukung serta pelaksana (pengamal) nilai-nilai agamanya.
- d. Dimensi-dimensi tersebut kemudian dimasukan dan dijabarkan dalam program operasional kependidikan dalam ruang lingkup dunia dan akhirat yang dapat meningkatkan ke arah tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>36</sup>

Lembaga Pendidikan Islam merupakan sebagai wadah untuk menggembleng mental, moral dan spiritual generasi muda dan anak-anak untuk dipersiapkan menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Lembaga pendidikan Islam yang dalam hal ini dapat diwakili oleh pesantren, madrasah dan sekolah Islam. Ketiga institusi pendidikan di atas memiliki nama yang berbeda, akan tetapi memiliki pemahaman yang sama baik secara fungsional dan substansional. Secara fungsional ketiga lembaga pendidikan tersebut. Sedangkan secara substansial dapat dikatakan bahwa ketiga institusi tersebut merupakan panggilan jiwa spiritual seorang kyai, ustadz, guru yang tidak semata-

---

<sup>36</sup>Ahmad Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta, Fadjar Dunia, 1999), h. 42-44.



mata didasari oleh motif materil, tetapi sebagai pengabdian kepada Allah. Dalam konteks ini Hujair A. H. Sanaky menulis

Pendidikan Islam telah memiliki visi dan misi yang ideal, yaitu “*Rohmatan Lil ‘Alamin*”. Selain itu, sebenarnya konsep dasar filosofis pendidikan Islam lebih mendalam dan menyangkut persoalan hidup multi dimensional, yaitu pendidikan yang tidak terpisahkan dari tugas kekhalifahan manusia, atau lebih khusus lagi sebagai penyiapan kader-kader khalifah dalam rangka membangun kehidupan dunia yang makmur, dinamis, harmonis dan lestari sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam al Qur’an. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang ideal, sebab visi dan misinya adalah “*Rohmatan Lil ‘Alamin*”, yaitu untuk membangun kehidupan dunia yang makmur, demokratis, adil, damai, taat hukum, dinamis, dan harmonis.<sup>37</sup>

Qodri Azizy merumuskan definisi Pendidikan Islam sebagai berikut

(1) Mendidik peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam, dan (2) Mendidik peserta didik untuk mempelajari materi ajaran Islam. Sehingga pengertian pendidikan agama Islam merupakan usaha secara sadar dalam memberikan bimbingan kepada anak didik untuk berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan pelajaran dengan materi-materi tentang pengetahuan Islam.<sup>38</sup>

## 2. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam

Pendidikan Islam mempunyai sejarah yang panjang. Dalam pengertian seluas-luasnya, pendidikan Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Dalam konteks masyarakat Arab, di mana Islam lahir dan pertama kali berkembang, kedatangan Islam lengkap dengan usaha-usaha pendidikan, untuk tidak menyebut sistem, merupakan transformasi besar.

---

<sup>37</sup>Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam; Membangun Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta, Safiria Insania Press, tt), h. 142.

<sup>38</sup>Ahmad Qodri Azizy, *Islam dan Permasalahan Sosial; Mencari Jalan Keluar*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), h. 22.

Sebab, masyarakat Arab pra-Islam pada dasarnya tidak mempunyai sistem pendidikan formal.<sup>37</sup> Menjelang datangnya Islam, bangsa Arab pada dasarnya telah mengembangkan satu kegiatan sastra, terutama dalam bentuk puisi. Meskipun sistem ekspresi dan transmisi yang dominan adalah lisan, tulisan telah mulai dikenal secara terbatas. Paling tidak untuk kalangan tertentu (Yahudi dan Kristen), pendidikan yang terstruktur, meskipun sangat sederhana, sudah mulai berkembang.<sup>38</sup> Pada saat datangnya Islam, hanya ada 17 orang Quraisy yang mengenal tulis baca.<sup>39</sup> Di tengah permusuhan kaum Quraisy, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh Rasulullah SAW., bersama pengikutnya yang hanya sedikit. Ketika akhirnya mereka hijrah ke Madinah (1 H/622 H), mereka menemukan bahwa beberapa orang dari suku Aus dan Khazraj (dua kabilah utama Madinah) dapat menulis dan membaca.<sup>40</sup>

Pada masa awal perkembangan Islam, tentu saja pendidikan formal yang sistematis belum terselenggara. Pendidikan yang berlangsung dapat dikatakan umumnya bersifat informal; dan inipun lebih berkaitan dengan upaya-upaya dakwah Islamiyah, penyebaran, dan penamaan dasar-dasar kepercayaan dan ibadah Islam. Dalam kaitan itulah bisa dipahami kenapa proses pendidikan Islam pertama kali berlangsung di rumah sahabat tertentu;

---

<sup>37</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta, Logos, 1999), h. vii.

<sup>38</sup>Hasan Asari, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam* (Bandung, Citapustaka Media, 2007), h. 7.

<sup>39</sup>Ahmad Syalabi, *History of Muslim Education* (Beirut, Dar al-Kasyaf, 1954), h. 16.

<sup>40</sup>Hasan Asari, *op. cit.*, h. 24.

yang paling terkenal adalah *D r al-Arqam*.<sup>41</sup> Tetapi ketika masyarakat Islam sudah terbentuk, maka pendidikan diselenggarakan di masjid. Proses pendidikan pada kedua tempat ini dilakukan dalam *halaqah*, lingkaran belajar.<sup>42</sup>

Madrasah lahir sebagai lembaga pendidikan yang berkembang secara alami dari cikal bakalanya, yaitu masjid. Masjid yang pada masa itu menjadi pusat kajian keagamaan, terutama masjid akademi (masjid *khan*). Tahapan perubahan sebelum menjadi madrasah adalah dari masjid, kemudian masjid akademi, hingga pada akhirnya menjadi madrasah. Untuk menamatkan pembelajaran dasar keislaman di masjid dibutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Pembiayaan pendidikan di masjid berasal dari wakaf *tahrir* (si pemberi wakaf tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di masjid).<sup>44</sup> Keberadaan madrasah merupakan salah satu bentuk inovasi dalam trend pendidikan Islam. Dikatakan sebagai inovasi karena pada masa sebelumnya belum ada madrasah.<sup>45</sup> Pendidikan secara informal telah berlangsung sejak awal Islam. Mereka yang berpengetahuan mendalam tentang al-Quran memimpin kelompok-kelompok diskusi, membaca surah-surah al-Quran dan menjelaskan makna yang terkandung di dalam al-

---

<sup>41</sup>Azyumardi Azra, *op. cit.*, h. vii.

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>George Makdisi, *Rise of Colleges* (Edinburgh, Edinburgh University Press, 1981), h. 27.

<sup>45</sup>Fachruddin, *loc. cit.*

Quran.<sup>46</sup> Dengan demikian, pendidikan secara informal berlangsung dalam bentuk diskusi tentang kandungan al-Quran. Dalam konteks ini George Makdisi menulis

Pada periode awal Islam, pengajaran agama diberikan di rumah-rumah. Rasulullah SAW., sendiri menggunakan rumah al-Arqam bin al-Arqam sebagai tempat pertemuan dengan para sahabat dan pengikut-pengikut beliau. Di sana kaum Muslimin mendapatkan pengajaran dari beliau, berupa kaidah-kaidah Islam dan ayat-ayat al-Quran. Selain itu Rasulullah saw. mengadakan pertemuan di rumah beliau sendiri di Mekkah. Di sana kaum Muslimin berkumpul untuk belajar dan membersihkan akidah serta pencerahan jiwa mereka.<sup>47</sup>

Untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak, kaum Muslimin pada saat itu mengirimkan anak-anak mereka secara khusus ke rumah-rumah para ulama untuk mendapatkan didikan langsung dari para ulama atau ke perpustakaan-perpustakaan untuk memperoleh kitab-kitab yang lengkap untuk dibaca dan dijadikan referensi.<sup>48</sup>

Salah satu lembaga pendidikan informal pada masa itu adalah perpustakaan. Perpustakaan-perpustakaan umum dibuka untuk umum, berdiri di masjid-masjid, masjid-akademi, dan madrasah-madrasah. Khalifah, wazir, dan penguasa lokal sering sekali membangun perpustakaan umum untuk mempromosikan kegiatan tulis-baca dan memajukan tingkat pendidikan dalam wilayah kekuasaan mereka. Lembaga-lembaga seperti itu tidak hanya

---

<sup>46</sup>Charles Michael Stanton, *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, Terj. Affandi dan Hasan Asari (Jakarta, Logos, 1994), h. 25.

<sup>47</sup>Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2003), h. 63.

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 64.

berkembang di Bagdad dan Kairo, tetapi juga di ibukota-ibukota propinsi dan sepanjang wilayah Afrika Utara, khususnya di pusat-pusat utama kebudayaan Islam di Andalusia.<sup>55</sup> Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa selain negara membangun fasilitas pendidikan formal, pada sisi lain para pemimpin (khalifah, wazir) membangun fasilitas pendidikan informal secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan program pemerintah pada masa itu.

#### 1) *Kuttab*

*Kuttab* merupakan sejenis tempat belajar yang mula-mula lahir di dunia Islam. Pada awalnya, *kuttab* berfungsi sebagai tempat memberikan pelajaran menulis dan membaca bagi anak-anak. *Kuttab* sebenarnya telah ada di negeri Arab sebelum datangnya agama Islam, tetapi belum begitu dikenal. Di antara penduduk Mekah yang mula-mula belajar menulis huruf Arab di *kuttab* ini adalah Sufyan bin Umayyah bin Abdul Syams dan Abu Qais bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Keduanya belajar dari Bisyr bin Abdul Malik yang mempelajarinya dari Hirah. *Kuttab* dalam bentuk awalnya berupa ruangan di rumah seorang guru.<sup>56</sup>

Sejalan dengan meluasnya wilayah kekuasaan kaum muslimin, bertambah pulalah jumlah penduduk yang memeluk Islam. Ketika itu *kuttab-kuttab* yang hanya mengambil tempat di ruangan rumah guru mulai dirasakan

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, h. 155.

<sup>56</sup>Dewan Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2003), h. 86.

tidak memadai untuk menampung anak-anak yang jumlahnya semakin besar. Kondisi yang demikian mendorong para guru dan orang tua murid mencari tempat lain yang lebih lapang untuk ketentraman belajar anak-anak. Tempat yang mereka pilih adalah sudut-sudut masjid.<sup>57</sup>

Selain dari *kuttab-kuttab* yang diadakan dalam masjid terdapat pula *kuttab* umum dalam bentuk madrasah yang mempunyai gedung sendiri dan dapat menampung ribuan murid. *Kuttab* jenis ini bersifat formal. *Kuttab* ini mulai berkembang karena adanya pengajaran khusus bagi anak-anak keluarga raja, pembesar, dan pegawai istana yang diasuh oleh seorang *mu'addib* (pendidik). Bentuk pengajaran yang demikian akhirnya berkembang menjadi *kuttab-kuttab* umum. Pendidik yang mulai mengembangkan pola pengajaran khusus itu ke arah pembentukan *kuttab* umum menurut Ahmad Syalabi ialah Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi (w.714). Al-Hajjaj pada mulanya menjadi *mu'addib* anak-anak Sulaiman bin Na'im yang menjadi wazir Abdul Malik bin Marwan. Pada saat inilah ia mengembangkan pendidikan anak dari bentuk khusus di rumah pembesar raja menjadi bentuk pendidikan umum yang disebut *kuttab* umum. Dari sini pula karir al-Hajjaj meningkat menjadi pembesar khalifah Bani Umayyah, al-Walid I (705-715).<sup>58</sup>

Pendidikan tingkat rendah Islam diadakan di *kuttab-kuttab* juga diberikan di istana untuk anak-anak pejabat, didasarkan pemikiran bahwa

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>*Ibid.*

pendidikan itu harus bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugas, setelah dewasa nanti. Atas dasar pemikiran tersebut, khalifah dan keluarganya serta para pembesar istana lainnya berusaha menyiapkan agar anak-anak mereka sejak kecil sudah diperkenalkan dengan tugas-tugas yang akan dipikulnya nanti. Corak pendidikan anak-anak di istana berbeda dengan pendidikan anak-anak di *kuttab-kuttab* pada umumnya. Rencana pelajaran untuk pendidikan di istana pada garis besarnya sama dengan rencana pelajaran pada *kuttab-kuttab* hanya sedikit ditambah dan dikurangi sesuai dengan kehendak orang tua mereka.<sup>59</sup>

*Kuttab* merupakan tempat pertama seorang anak belajar membaca al-Quran, menulis, prinsip-prinsip agama, bahasa dan ilmu hitung. Kesenian menulis atau kaligrafi sangat diperhatikan pula karena merupakan bagian dari kesenian lukis-melukis. Di *kuttab* disediakan pengasuh-pengasuh khusus di bidang tersebut di atas secara penuh. Demikian pula, Rasulullah SAW., sendiri telah mempekerjakan orang-orang Islam (para sahabat) yang tahu tulis baca untuk mencatat ayat-ayat Alquran. Untuk mengajar kaum muslimin pun beliau meminta bantuan orang non-Muslim untuk mengajar kaum Muslimin membaca dan menulis karena pada masa itu jumlah kaum Muslimin yang pandai tulis baca masih sedikit.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Suwito dan Fauzan, *op. cit.*, h. 13.

<sup>60</sup>Muhammad Athiyah al-Abrasi, *op. cit.*, h. 65.

Keterampilan tulis baca yang merupakan materi utama pendidikan *kuttab* – menjadi semakin penting sejalan dengan berkembangnya komunitas Muslim Madinah. Kebutuhan paling penting, tentunya, adalah mencatat wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad saw. dari waktu ke waktu. Tetapi tulis-baca ini juga dibutuhkan untuk memungkinkan komunikasi antara umat Islam dengan suku-suku dan bangsa-bangsa lain. Tulis-baca sebagai sebuah prioritas penting dapat dilihat dalam peristiwa pembebasan beberapa tawanan perang badar.<sup>62</sup>

## 2) Masjid

Masjid juga berperan dalam pendidikan Islam. Masjid pada masa Rasulullah SAW., dijadikan tempat untuk memberi pelajaran. Di antara siswa yang menjadi siswa di Masjid Nabi adalah Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Abbas. Di dalam masjid dipelajari kaidah-kaidah hukum agama.<sup>63</sup> Struktur pengajian di Masjid Nabi lebih merupakan bentuk nonformal. Walau bagaimanapun struktur pengajian yang lebih sistemik dan formal dapat diadakan apabila sebuah surau didirikan bersambungan dengan masjid tersebut lalu diberi nama al-Suffah. Oleh karena struktur pengajian di sini lebih sistemik dan formal.<sup>64</sup> Di masjid juga diberikan pengajaran tentang

---

<sup>62</sup>Hasan Asari, *op. cit.*, h. 25.

<sup>63</sup>Muhammad Athiyah al-Abrasi, *op. cit.*, h. 71.

<sup>64</sup>Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam dalam Abad ke 21* (Jakarta, PT. Pustaka Alhusna Baru, 2003), h. 18.



kesehatan dan oba-obatan (*medicine*).<sup>65</sup> Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, negeri Persi, Syam, Mesir dan seluruh semenanjung tanah Arab ditaklukkan.<sup>66</sup> Muhammad Athiyyah al-Abrasi menulis :

Khalifah Umar bin Khattab telah memerintahkan para gubernurnya untuk mendirikan masjid-masjid di semua negeri dan kota-kota yang telah dikuasai oleh pemerintah Islam. Pada abad ketiga hijrah, kota Bagdad sudah penuh dengan masjid, demikian pula kota Mesir. Atas perintah khalifah, masjid yang pertama kali dibangun adalah masjid Amru bin Ash. Di masjid ini diberikan pelajaran-pelajaran agama dan akhlak dan secara berangsur-angsur pula pelajaran-pelajaran di masjid ini semakin meningkat.<sup>67</sup>

Pada masa khalifah Umar bin Khattab juga ada instruksi kepada penduduk kota supaya diajarkan kepada anak-anak mereka tentang berenang, mengendarai kuda, memanah, dan membaca serta menghafal syair-syair mudah dan peribahasa. Instruksi Umar itu dilaksanakan oleh guru-guru di tempat-tempat yang dapat dilaksanakan. Misalnya berenang dapat dilaksanakan di kota-kota yang mempunyai sungai seperti di Irak, Syam, Mesir dan lain-lain.<sup>68</sup> Pada masa Abbasyiah, sekolah-sekolah terdiri dari beberapa tingkat: (1) Tingkat sekolah rendah, yaitu *kuttab* untuk tempat belajar anak-anak. Di samping *kuttab* ada pula anak-anak belajar di rumah, di istana, di toko-toko dan di pinggir pasar, (2) Tingkat sekolah menengah, yaitu di masjid dan di majelis sastra dan ilmu pengetahuan, sebagai

---

<sup>65</sup>H,A,R. Gibbs dan J.H. Krammers, *op. cit.*, h. 306.

<sup>66</sup>Hasan Langgulung, *op. cit.*, h. 19.

<sup>67</sup>Muhammad Athiyah al-Abrasi, *op. cit.*, h. 66.

<sup>68</sup>Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 40.

sambungan dari *kuttab*, (3) Tingkat perguruan tinggi, seperti Baitul Hikmah di Bagdad, dan Darul Ilmi di Mesir, di masjid-masjid dan lain-lain.<sup>69</sup>

### 3) Majelis Taklim

Majelis taklim merupakan lembaga pendidikan tertua dalam Islam, sebab sudah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah SAW., Meskipun tidak disebut dengan majelis taklim, pengajian Nabi Muhammad SAW., yang berlangsung secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam di zaman Rasul saw. atau periode Mekah dapat dianggap sebagai majelis taklim dalam konteks sekarang. Pada periode Madinah, ketika Islam telah menjadi kekuatan nyata dalam masyarakat, penyelenggaraan pengajian itu lebih pesat. Rasulullah SAW., duduk di masjid Nabawi untuk memberikan pengajian kepada para sahabat dan kaum muslimin ketika itu. Hingga saat ini di Masjidilharam terdapat pengajian (majelis taklim) yang diasuh ulama-ulama terkenal dan terkemuka serta dikunjungi para jamaah.<sup>70</sup> Pada masa berlangsungnya gerakan *tajdid*, pembelajaran pada bidang pendidikan umum tidak begitu dianggap. Sesuatu yang ada pada masa itu adalah pengkajian pada bidang spiritual, sehingga kajian spiritual mengalami agredasi. Idealnya adalah pembelajaran dilakukan dengan tidak memisahkan antara ilmu-ilmu umum (*ulum al-gharbiyah*) dengan ilmu-ilmu agama (*ulum ad-*

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, h. 48.

<sup>70</sup>Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. 203.

*diniyah*). Dari kedua model keilmuan ini seharusnya dapat diintegrasikan. Praktik pengintegrasian keilmuan ini telah dijalankan oleh masjid dan madrasah pada masa awal berdirinya.<sup>71</sup>

### **3. Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia**

Masuknya Islam ke bumi Nusantara ini, baik pada gelombang pertama (abad ke-7 M) maupun gelombang ke-2 (abad ke-13) tidak diikuti oleh muncul atau berdirinya madrasah. Lembaga-lembaga pendidikan yang bermunculan seiring dengan penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Jawa, ketika itu ialah pesantren. Dengan alasan itu pula pesantren secara historis seringkali disebut tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*). Karena itu membicarakan madrasah di Indonesia dalam kaitannya dengan sejarah munculnya lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam seringkali tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan mengenai pesantren sebagai cikal-bakalnya. Dengan kata lain, madrasah merupakan perkembangan lebih lanjut dari pesantren. Karena itu menjadi penting untuk mengamati proses historis sebagai mata rantai yang menghubungkan perkembangan pesantren di masa lalu dengan munculnya madrasah di kemudian hari.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Fachruddin, *loc. cit.*

<sup>72</sup>Lihat, Harjati Soebadio, "Agama sebagai Sasaran Penelitian Filologi", dalam Parsudi Suparlan (peny.), *Pengetahuan Budaya, Ilmu- ilmu Sosial dan Pengkajian Masalah-masalah Agama*, (Jakarta, Balitbang Depag RI, 1981/1982), h. 32.

Menurut Nurcholish Madjid, lembaga pendidikan yang serupa dengan pesantren sebenarnya sudah ada sejak masa kekuasaan Hindu-Budha, sehingga Islam tinggal meneruskan dan mengislamkan lembaga pendidikan yang sudah ada itu. Namun demikian dalam proses pengislaman itu tidak bisa dihindari terjadinya akomodasi dan adaptasi. Tegasnya, karena lembaga pendidikan yang serupa dengan pesantren itu di masa Hindu-Budha lebih bernuansa mistik, maka ajaran Islam yang disampaikan di pesantren pun pada mulanya bercorak atau bernuansa mistik pula, yang dalam khasanah Islam lebih dikenal dengan sebutan tasawuf. Pada masa perkembangan Islam di Indonesia itu, tasawuf memang merupakan gejala umum dan sangat dominan di Dunia Islam pada umumnya. Karena penduduk Nusantara sebelum Islam memiliki kecenderungan yang kuat terhadap mistik, maka agama Islam yang disampaikan dengan pendekatan mistik atau tasawuf itu lebih mudah diterima dan dianut.<sup>73</sup>

Persentuhan global dengan pusat Islam di Haramain di akhir abad ke-19 M dan awal abad ke-20 M itulah, menurut Malik Fadjar bahwa yang memungkinkan para pelaku pendidikan Islam melihat sistem pembelajaran yang lebih terprogram. Maka di awal abad ke-20 M di Indonesia secara berangsur-angsur

---

<sup>73</sup>Contoh dari segi mistik ini misalnya adalah adanya konsep "wirid" dalam pengajian. Seorang kiai secara konsisten mengaji kitab tertentu pada saat tertentu, misalnya kitab Sanusiyah pada malam Kamis. Hal itu adalah sebagai wirid yang dikenakan kepada dirinya sendiri, sehingga menjadi semacam wajib hukumnya yang kalau ditinggalkan dengan sengaja dianggap akan mendatangkan dosa. Contoh lain dari suasana mistik ini terlihat pula dalam hubungan kiai-santri yang lebih merupakan kelanjutan dari konsep hubungan "guru-cantrik" yang telah ada sebelum Islam datang ke Jawa, yang banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep Hindu-Budha, atau sekurang- kurangnya konsep stratifikasi masyarakat Jawa sendiri. Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta, Paramadina, 1997), h. 23-24.

tumbuh dan berkembang pola pembelajaran Islam yang dikelola dengan sistem "madrasi" yang lebih modern, yang kemudian dikenal dengan nama "madrasah."<sup>74</sup>

Sejak awal kemunculannya, madrasah di Indonesia sudah mengadopsi sistem sekolah modern dengan ciri-ciri: digunakannya sistem kelas, pengelompokan pelajaran-pelajaran, penggunaan bangku, dan dimasukkannya pengetahuan umum sebagai bagian dari kurikulumnya.<sup>75</sup> Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyinggung tentang pendidikan Islam. Di dalam aturan tersebut setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam, yaitu

Pertama, kelembagaan formal, nonformal, dan informal didudukkannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah, dan dipertegas pula tentang kedudukannya sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam. Selanjutnya diakui majelis taklim sebagai pendidikan nonformal dan masuknya Raudhatul Athfal sebagai lembaga pendidikan anak usia dini, dan dipertegas pula tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, dikukuhkannya mata pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan nasional.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup>Ahmad Malik Fadjar, *op. cit.*, h. 114; Tentang jaringan Islam itu lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung, Mizan, 1994).

<sup>75</sup>Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta, Logos, 1999), h. 193.

<sup>76</sup>Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Cetakan II (Jakarta, Kencana, 2007), h. 9.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.<sup>73</sup> Keberadaan lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga formal dinyatakan dalam pasal 17 bahwa pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Mengenai pendidikan menengah dinyatakan dalam pasal 18 bahwa Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan dalam pasal 20 dinyatakan bahwa pendidikan tinggi dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.<sup>74</sup> Selanjutnya, dalam pasal 26 dan 27 dinyatakan

Bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok

---

<sup>73</sup>Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta, Cemerlang, 2003), h. 4.

<sup>74</sup>Haidar Putra Daulay, *op. cit.*, h. 14-15.

belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.<sup>75</sup>

Mengenai pendidikan keagamaan, dalam pasal 30 dinyatakan

Bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.<sup>76</sup>

Pendidikan keagamaan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor

20 Tahun 2003 dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No. 55 Tahun 2007. Dalam pasal 1 PP. No. 55 Tahun 2007 dinyatakan

Bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, h. 20.

<sup>76</sup>*Ibid.*, h. 22.

<sup>77</sup>*Ibid.*, h. 23.

Selanjutnya dalam pasal 4 dinyatakan bahwa pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk matapelajaran atau kuliah agama. Dalam pasal 9 dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.<sup>78</sup> Dalam pasal 11 ayat (2) dinyatakan bahwa hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Pasal 13 PP No. 55 Tahun 2007 menyatakan bahwa pendidikan keagamaan jalur nonformal yang tidak berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 orang atau lebih merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.<sup>79</sup>

Dalam pasal 14 dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal. Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan diniyah

---

<sup>78</sup>*Ibid.*

<sup>79</sup>*Ibid.*



nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan al-Quran, diniyah taklimiyah atau bentuk lain yang sejenis. Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.<sup>80</sup> Dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam. Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla atau tempat lain yang memenuhi syarat. Begitu juga majelis taklim dapat dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.<sup>81</sup> Dalam Pasal 24 dinyatakan bahwa pendidikan al-Quran terdiri dari Taman Kanak-Kanak al-Quran (TKQ), Taman Pendidikan al-Quran (TPQ), Ta'limul Qur'an li al-Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis. Kurikulum pendidikan al-Quran adalah membaca, menulis, dan menghafal ayat-ayat al-Quran, tajwid, serta menghafal doa-doa utama. Pendidik pada pendidikan Alquran minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca al-Quran dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran al-Quran.<sup>82</sup> Dalam Pasal 26 dinyatakan bahwa pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi. Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>81</sup>

### **3. Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia**

Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia yang telah eksis sejak masa pra kemerdekaan hingga dewasa ini yang mencakup pesantren, madrasah dan sekolah Islam, sebagai berikut

#### **a. Pondok Pesantren**

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan sejarahnya telah mengakar secara berabad-abad. Sebagai lembaga pendidikan Islam khas Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pesantren memiliki keunikan tersendiri yang tidak dapat ditemui dalam sejarah peradaban Timur Tengah sekalipun. Secara etimologi, istilah pesantren berasal dari kata "*santri*", yang dengan awalan *pe-* dan akhiran *-an* berarti tempat tinggal para santri. Kata "*santri*" juga merupakan penggabungan antara suku kata *sant* (manusia baik) dan *tra* (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat diartikan sebagai tempat

---

<sup>81</sup>*Ibid.*

mendidik manusia yang baik.<sup>83</sup> Sementara, Zamakhsyari Dhofier menyebutkan bahwa menurut Profesor Johns, istilah "santri" berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji, sedang C.C. Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah *shastri* yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci Agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci Agama Hindu. Kata *shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.<sup>84</sup>

Dalam hubungan dengan usaha pengembangan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah (Kementrian Agama RI), pengertian yang lazim dipergunakan untuk pesantren adalah sebagai berikut:

- 1) Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan dengan cara *non-klasikal* (sistem *Bandongan* dan *Sorogan*) dimana seorang kyai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, (*Sistem Bandongan dan Sorongan*) di mana seorang kyai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang tertulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, sedang para santri biasanya tinggal dalam pondok/asrama dalam lingkungan pesantren tersebut.

---

<sup>83</sup>Ridwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal; Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), h. 80-81. Abdurrahman Assegaf, *Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, SUKA Press, 2007), h. 86.

<sup>84</sup>Zamakhsyari Dhofier, *op. cit.*, h. 18.

- 2) Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada dasarnya sama dengan pondok pesantren tersebut diatas tetapi para santrinya tidak disediakan pondokan di kompleks pesantren, namun tinggal tersebar di seluruh penjuru desa sekeliling pesantren tersebut (*Santri kalong*), dimana cara dan metode pendidikan dan pengajaran agama Islam diberikan dengan sistem *wetonan*, para santri berduyun-duyun pada waktu-waktu tertentu (tiap hari jum'at, ahad, selasa atau tiap-tiap waktu shalat dan sebagainya).
- 3) Pondok pesantren dewasa ini adalah gabungan antara sistem pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan sistem *bandongan*, *sorogan* atau *wetonan* dengan disediakan pondokan untuk para santri yang berasal dari jauh dan juga menerima santri *kalong*, yang dalam istilah pendidikan moderen telah menuhi kriteria pendidikan non formal serta menyelenggarakan juga pendidikan formal berbentuk madrasah dan bahkan sekolah umum dalam berbagai bentuk tingkatan dan aneka kejuruan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masing-masing.<sup>85</sup>

Pesantren atau pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang cukup unik karen memiliki elemen dan karakteristik yang berbeda

---

<sup>85</sup>Marwan Saridjo, dkk, *Sejarah Pondok Persantren di Indonesia*, (Jakarta, Dharma Bhakti, 1982), h. 9-10. Mujamil Qomar, *Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam; Manajemen Pendidikan Islam*, (Jakarta, Erlangga, 2007), h. 58.

dengan lembaga pendidikan Islam lainnya. Elemen-elemen Islam yang paling pokok, yaitu: pondok atau tempat tinggal para santri, masjid, kitab-kitab klasik, kyai dan santri.<sup>86</sup> Kelima elemen inilah yang menjadi persyaratan terbentuknya sebuah pesantren, dan masing-masing elemen tersebut saling terkait satu sama dengan lain untuk tercapainya tujuan pesantren, khususnya, dan tujuan pendidikan Islam, pada umumnya, yaitu membentuk pribadi muslim seutuhnya (*insan kamil*). Adapun yang dimaksud dengan pribadi muslim seutuhnya adalah pribadi ideal meliputi aspek individual dan sosial, aspek intelektual dan moral, serta aspek material dan spiritual. Sementara, karakteristik pesantren muncul sebagai implikasi dari penyelenggaraan pendidikan yang berlandaskan pada keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian (menolong diri sendiri dan sesama), ukhuwwah diniyyah dan Islamiyyah dan kebebasan. Dalam pendidikan yang seperti itulah terjalin jiwa yang kuat, yang sangat menentukan falsafah hidup para santri.<sup>87</sup>

## **b. Madrasah**

Kata "*madrasah*" dalam bahasa Arab adalah bentuk kata "keterangan tempat" (*zharaf makan*) dari akar kata "*darasa*". Secara harfiah "*madrasah*" diartikan sebagai "tempat belajar para pelajar", atau "tempat untuk memberikan pelajaran."<sup>88</sup> Dari akar kata "*darasa*" juga bisa diturunkan kata "*midras*" yang

---

<sup>86</sup>Zamakhshari Dhofier, *op. cit.*, h. 44.

<sup>87</sup>*Ibid.*, h. 45.

<sup>88</sup>Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, Edisi Indonesia (Surabaya, Risalah Gusti: 1996), h. 66.

mempunyai arti "buku yang dipelajari" atau "tempat belajar"; kata "*al-midras*" juga diartikan sebagai "rumah untuk mempelajari kitab Taurat." Kata "*madrasah*" juga ditemukan dalam bahasa Hebrew atau Aramy, dari akar kata yang sama yaitu "*darasa*", yang berarti "membaca dan belajar" atau "tempat duduk untuk belajar."<sup>89</sup> Dari kedua bahasa tersebut, kata "*madrasah*" mempunyai arti yang sama: "tempat belajar." Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata "*madrasah*" memiliki arti "sekolah" kendati pada mulanya kata "sekolah" itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing, yaitu "*school*" atau "*scola*."<sup>90</sup>

Dalam perkembangannya, sistem pendidikan madrasah mengalami perubahan tidak menggunakan sistem pendidikan yang sama dengan pendidikan Islam pesantren. Karena madrasah mulai memasukkan pelajaran-pelajaran umum dan metode yang digunakan tidak lagi dengan metode *sorogan* atau *bandongan*, melainkan mengikuti sistem pendidikan modern dengan model klasikal. Madrasah memiliki metode pengajaran seperti hafalan, latihan dan praktek. Ini kielanjutan dari masa Rasulullah SAW. Terutama ketika beliau memberikan pelajaran al-Qur'an, pada masa perkembangan berikutnya, pendidikan Islam yang dilakukan di Madrasah menggunakan metode talqin, dimana guru mendikte dan murid mencatat lalu menghafal. Setelah, hfalan guru lalu menjelaskan

---

<sup>89</sup> Abu Luwis al-Yasu'i, *al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Munjid Fi al-A'lam*, (Beirut, Dar al-Masyriq, tt), h. 221-221.

<sup>90</sup> Ahmad Malik Fadjar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*, (Jakarta, LP3NI, 1998), h. 11.

maksudnya. metode ini oleh Maksud disebut sebagai metode tradisional; murid mencatat, menuliskan materi pelajaran, membaca, menghafal dan setelah itu berusaha memahami arti dan maksud pelajaran yang diberikan. Pada perkembangan selanjutnya pendidikan madrasah dikembangkan menjadi beberapa jenjang pendidikan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Madrasah Model adalah madrasah yang secara khusus diformulasikan untuk meningkatkan kualitas bidang sains dan matematika.<sup>91</sup>

### c. Sekolah Islam

Sejak awal abad ke-20 gagasan modernisasi Islam menemukan momentum. Pendidikan direalisasikan dengan pendirian lembaga-lembaga pendidikan modern. Gagasan tersebut menuntut adanya modernisasi sistem pendidikan Islam. Perkembangan mencolok terjadi pada tahun 90an adalah munculnya sekolah-sekolah Islam elite Muslim yang dikenal sebagai "sekolah Islam". Sekolah-sekolah itu mulai menyatakan diri secara formal dan diakui oleh kalangan Muslim sebagai "Sekolah Unggulan" atau Sekolah Islam unggulan. Sekolah Islam unggulan tersebut seakan menjawab tuntutan modernisasi pendidikan Islam.<sup>92</sup>

Sekolah-sekolah tersebut dapat dikatakan sebagai sekolah "elite" Islam dikarenakan beberapa hal yang mendasarinya. Menurut Sanaky bahwa alasan

---

<sup>91</sup>Tim Penyusun Depag RI, *Sejarah Madrasah; Pertumbuhan, Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2004), h. 67, dan 160.

<sup>92</sup>Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam; Membangun Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta, Safiria Insania Press, tt), h. 142.

yang melatar belakangi sekolah-sekolah tersebut bersifat elite antara lain dari segi akademis. Dalam beberapa kasus, hanya siswa-siswa yang terbaik saja yang dapat diterima. Sedangkan tenaga pengajar (guru) yang mengajar pun hanyalah mereka yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan melalui seleksi yang kompetitif. Sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh manajemen yang baik dengan berbagai fasilitas yang memadai dan lengkap seperti perpustakaan, ruang komputer, masjid dan sarana olah raga. Menurut Alaydroes, sekolah Islam termasuk sekolah Islam terpadu, memasukkan nilai-nilai Islam dari berbagai saluran. Baik saluran formal dalam arti pembelajaran agama, dan semua mata pelajaran yang bernuansa islami, apakah itu PMP, itu semua harus dikaitkan dengan nilai-nilai spritual, nilai-nilai Illahiah. Kemudian yang kedua, merekrut guru-guru yang punya visi dan ideologi yang sama, mereka tidak diperkenankan merokok, berakhlak karimah, dan bisa menjadi teladan. Selain itu, perilaku ibadah anak-anak juga dibentuk, lewat sholatnya atau doa-doanya dan diupayakan untuk mengikuti sunnah.<sup>93</sup>

Sekolah Islam Terpadu digagas karena melihat kejenuhan sekolah-sekolah nasional yang mendidik anak sekuleristik dengan memisahkan kehidupan keagamaan dan kehidupan sosial bermasyarakat. Kemudian ada beberapa sekolah Islam yang juga bagin dari sekuleristik yang sangat fokus terus di ibadah-ibadah mahdloh sehingga mengabaikan sehi ilmu pengetahuan. Ini

---

<sup>93</sup>Alaydroes, *<http://www.pks-anz.org/pkspedia/index.php>*, akses Jum'at 6/6/2010.



berdampak pada umat Islam yang semakin terpuruk dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Guna menjaga mutu dan kualitas sekolah Islam terpadu, sejumlah praktisi dan pemerhati pendidikan Islam, membentuk sebuah wadah yaitu Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), dengan misi utamanya; Islami, efektif dan bermutu.<sup>94</sup>

Berdasarkan uraian terdahulu dapat diketahui bahwa lembaga Pendidikan Islam Terpadu mengalami pertumbuhan dan perkembangannya mulai dari lembaga pendidikan Pesantren, Madrasah Model dan Terpadu serta Sekolah Islam Terpadu yang terdiri dari Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Sekolah Menengah Islam Terpadu (SMPIT) dan Sekolah Menengah Atas Terpadu (SMAIT).

---

<sup>94</sup>Rachmat Syarifudin, "JSIT Memberdayakan Sekolah-Sekolah Islam" *copyright©2010* [www.republika.com](http://www.republika.com).